

# **Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI)**

**PRINSIP DASAR PENYUSUNAN DAN  
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN  
BANK INDONESIA  
(PDP2LK)**

## **PENGANTAR**

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Prinsip Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia (PDP2LK) pada rapat tanggal 29 Oktober 2012.

Jakarta, 29 Oktober 2012

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Harti Haryani	Wakil Ketua
Ardhayadi M.	Anggota
Hilzahra Pheni	Anggota
Marsuki	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota

## DAFTAR ISI

Paragraf

<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>01-27</b>
Tujuan dan Peranan .....	02-04
Ruang Lingkup .....	05-11
Lingkungan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia .....	12-27
Tujuan Bank Indonesia .....	14-17
Hubungan Tujuan dan Transaksi Bank Indonesia.....	18-22
Fungsi dan Tugas Lain Bank Indonesia.....	23
Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang Independen.....	24
Pengguna dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan Bank Indonesia...	25-27
<b>TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA .....</b>	<b>28-35</b>
Posisi Keuangan dan Surplus/Defisit Bank Indonesia .....	30-34
Catatan dan Skedul Tambahan .....	35
<b>ASUMSI DASAR AKUNTANSI .....</b>	<b>36-38</b>
Dasar Akrual .....	36
Kelangsungan Hidup .....	37
Periodisasi .....	38
<b>KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>39-63</b>
Dapat Dipahami .....	40
Relevan.....	41-46
Kesesuaian dengan Upaya Pencapaian Tujuan Bank Indonesia.....	43
Materialitas .....	44-45
Ketepatan Waktu.....	46
Andal .....	47-54
Pertimbangan Sehat .....	49
Penyajian Jujur .....	50-51
Substansi Mengungguli Bentuk.....	52
Netralitas.....	53
Kelengkapan.....	54
Dapat Dibandingkan.....	55-58
Kendala Informasi yang Relevan dan Andal .....	59-62
Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.....	59
Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif .....	60-61

Keterbatasan Nilai Prediksi.....	62
Penyajian Wajar .....	63
<b>UNSUR LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>64-101</b>
Posisi Keuangan .....	66-87
Aset .....	70-76
Liabilitas .....	77-87
Surplus/Defisit.....	88-101
Penghasilan.....	93-97
Beban.....	98-101
<b>PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN.....</b>	<b>102-123</b>
Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan dan Kesesuaian Manfaat Ekonomi dengan Upaya Pencapaian Tujuan Bank Indonesia.....	105-107
Keandalan Pengukuran .....	108-110
Pengakuan Aset .....	111-112
Pengakuan Uang dalam Peredaran .....	113
Pengakuan Liabilitas Lainnya dari Pelaksanaan Kebijakan Bank Indonesia.....	114
Pengakuan Selisih Revaluasi .....	115
Pengakuan Modal .....	116
Pengakuan Penghasilan .....	117-118
Pengakuan Beban.....	119-123
<b>PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>124-127</b>

1 **PENDAHULUAN**

2  
3 01. Kerangka dasar pelaporan keuangan Bank Indonesia diatur  
4 dalam Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan  
5 (PDP2LK) sesuai dengan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia  
6 (PDGGBI) Nomor 14/10/PDG/2012 tanggal 04 Mei 2012 tentang Kerangka  
7 Dasar Penyusunan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia  
8 (KDPKAK-BI).

9  
10 **Tujuan dan Peranan**

11  
12 02. Prinsip dasar ini digunakan sebagai acuan bagi:

- 13 (a) komite penyusun kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia,  
14 dalam pelaksanaan tugasnya;  
15 (b) manajemen Bank Indonesia, untuk mengatasi masalah akuntansi  
16 keuangan yang belum diatur dalam pernyataan kebijakan akuntansi  
17 keuangan Bank Indonesia;  
18 (c) pemeriksa laporan keuangan Bank Indonesia, dalam memberikan  
19 pendapat apakah laporan keuangan Bank Indonesia telah disusun  
20 sesuai dengan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan Bank  
21 Indonesia; dan  
22 (d) para pengguna laporan keuangan Bank Indonesia, dalam menafsirkan  
23 informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Bank Indonesia yang  
24 disusun sesuai dengan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan  
25 Bank Indonesia.

26  
27 03. Prinsip ini bukan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan  
28 sehingga tidak mendefinisikan pernyataan kebijakan akuntansi untuk  
29 permasalahan pengukuran atau pengungkapan tertentu.

30  
31 04. Dalam hal terdapat perbedaan mendasar antara prinsip dasar  
32 dan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan, maka ketentuan pernyataan  
33 kebijakan akuntansi keuangan harus diunggulkan relatif terhadap prinsip  
34 dasar ini. Meskipun demikian, berhubung prinsip dasar ini dimaksudkan  
35 sebagai acuan bagi komite penyusun kebijakan akuntansi keuangan Bank  
36 Indonesia dalam pengembangan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan  
37 pada masa depan dan dalam peninjauan kembali terhadap pernyataan  
38 kebijakan akuntansi keuangan yang berlaku, maka banyaknya perbedaan  
39 mendasar tersebut dapat diminimalkan dengan berjalannya waktu.

40  
41 **Ruang Lingkup**

42  
43 05. PDP2LK merupakan prinsip-prinsip yang mendasari perlakuan  
44 akuntansi atas transaksi Bank Indonesia yang bersifat konvensional dan  
45 unik. Prinsip yang mendasari perlakuan akuntansi untuk transaksi yang  
46 bersifat konvensional, tetapi tidak unik, akan mengacu pada Kerangka

1 Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi  
2 Keuangan (KDP2LK SAK) Umum. Prinsip yang mendasari perlakuan  
3 akuntansi untuk transaksi yang bersifat syariah, tetapi tidak unik, akan  
4 mengacu pada KDP2LK SAK Syariah, sedangkan prinsip yang mendasari  
5 perlakuan akuntansi untuk transaksi yang bersifat syariah dan unik akan  
6 mengacu pada pengaturan khusus yang disusun oleh komite penyusun  
7 kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia.

8  
9 06. Transaksi Bank Indonesia yang bersifat syariah adalah transaksi  
10 yang dilaksanakan Bank Indonesia dengan berdasar pada prinsip-prinsip  
11 syariah. Transaksi yang tidak memenuhi definisi tersebut dikategorikan  
12 sebagai transaksi konvensional.

13  
14 07. Transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik adalah:  
15 (a) transaksi yang hanya terdapat di Bank Indonesia sebagai bank sentral;  
16 atau  
17 (b) transaksi yang terdapat di entitas lain, tetapi dilakukan Bank Indonesia  
18 dengan tujuan yang berbeda dengan entitas lain.

19  
20 08. Prinsip dasar ini mencakup:  
21 (a) tujuan laporan keuangan Bank Indonesia;  
22 (b) asumsi dasar laporan keuangan Bank Indonesia;  
23 (c) karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam  
24 laporan keuangan Bank Indonesia; serta  
25 (d) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan  
26 Bank Indonesia.

27  
28 09. Prinsip dasar ini membahas laporan keuangan Bank Indonesia  
29 untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*), yang selanjutnya  
30 hanya disebut sebagai "laporan keuangan". Laporan keuangan disusun dan  
31 disajikan sesuai dengan periode yang ditetapkan dalam ketentuan yang  
32 mengatur Bank Indonesia. Beberapa diantara pengguna memerlukan dan  
33 berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup  
34 dalam laporan keuangan. Meskipun demikian, banyak pengguna sangat  
35 bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi  
36 keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan tersebut seharusnya disusun  
37 dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan  
38 keuangan dengan tujuan khusus dan perhitungan yang dilakukan untuk  
39 tujuan perpajakan tidak termasuk dalam prinsip dasar ini.

40  
41 10. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan  
42 keuangan. Laporan keuangan Bank Indonesia yang lengkap meliputi laporan  
43 posisi keuangan, laporan surplus/defisit, catatan dan laporan lain, materi

1 penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, serta  
2 skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut.

3  
4 11. Prinsip dasar ini berlaku untuk laporan keuangan Bank  
5 Indonesia. Bank Indonesia menyampaikan laporan keuangan untuk  
6 digunakan oleh pengguna yang mengandalkan laporan keuangan tersebut  
7 sebagai sumber utama informasi keuangan Bank Indonesia.

### 8 **Lingkungan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia**

9  
10  
11 12. Lingkungan organisasi Bank Indonesia berpengaruh terhadap  
12 karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan Bank Indonesia.

13  
14 13. Ciri-ciri penting lingkungan Bank Indonesia yang perlu  
15 dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan  
16 keuangan adalah sebagai berikut:

- 17 (a) tujuan Bank Indonesia;  
18 (b) hubungan tujuan dan transaksi Bank Indonesia;  
19 (c) fungsi dan tugas lain Bank Indonesia; dan  
20 (d) kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen.

### 21 Tujuan Bank Indonesia

22  
23  
24 14. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara  
25 stabilitas nilai rupiah sesuai dengan amanat peraturan perundang-  
26 undangan. Stabilitas nilai rupiah tersebut terutama dipengaruhi oleh  
27 kebijakan moneter, fiskal, sektor keuangan, dan sektor riil. Karena  
28 kewenangan Bank Indonesia tidak mencakup seluruh kebijakan tersebut,  
29 pencapaian tujuan Bank Indonesia tidak sepenuhnya dapat dikendalikan  
30 oleh Bank Indonesia.

31  
32 15. Pencapaian tujuan Bank Indonesia, yaitu stabilitas nilai rupiah,  
33 tidak dapat diukur dalam satuan mata uang. Oleh sebab itu, laporan  
34 keuangan Bank Indonesia tidak dapat secara langsung digunakan untuk  
35 mengukur pencapaian tujuan Bank Indonesia. Meskipun demikian, dampak  
36 keuangan dari sebagian besar upaya atau kegiatan Bank Indonesia dalam  
37 mencapai tujuannya dapat diukur dalam satuan mata uang sehingga  
38 laporan keuangan Bank Indonesia dapat digunakan untuk mengukur  
39 dampak keuangan dari upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia tersebut.  
40 Untuk meningkatkan pemahaman pengguna atas informasi keuangan Bank  
41 Indonesia, pengguna juga perlu membaca informasi nonkeuangan yang  
42 memaknai informasi keuangan tersebut.

1           16. Laporan keuangan Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk  
2 menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam  
3 mencapai tujuan Bank Indonesia. Seperti dijelaskan pada paragraf 15,  
4 penggunaan sumber daya oleh Bank Indonesia dapat diukur dalam satuan  
5 mata uang, tetapi pencapaian tujuannya tidak dapat diukur dalam satuan  
6 mata uang. Oleh sebab itu, tidak dapat dilakukan perhitungan efisiensi  
7 dalam ukuran perbandingan nilai keuangan dari tujuan terhadap biaya  
8 untuk mencapai tujuan tersebut.

9  
10           17. Manfaat yang diperoleh dari pencapaian tujuan Bank Indonesia  
11 bukan hanya bersifat ekonomi, melainkan juga dapat bersifat sosial.  
12 Keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara stabilitas  
13 nilai rupiah dapat memberikan kepastian kepada dunia usaha,  
14 meningkatkan kepercayaan publik domestik dan asing terhadap  
15 perekonomian nasional, mencegah penurunan daya beli masyarakat akibat  
16 inflasi yang tidak terkendali, dan pada akhirnya membantu menciptakan  
17 kondisi dan lingkungan sosial yang lebih baik.

#### 18 19 Hubungan Tujuan dan Transaksi Bank Indonesia

20  
21           18. Dalam upaya mencapai tujuan seperti pada paragraf 14, Bank  
22 Indonesia melaksanakan tugas yang menimbulkan transaksi yang berbeda  
23 atau transaksi yang sama dengan tujuan berbeda jika dibandingkan dengan  
24 entitas lain sehingga berdampak terhadap makna informasi keuangan dari  
25 transaksi tersebut. Oleh sebab itu, informasi keuangan dari transaksi yang  
26 dilakukan Bank Indonesia harus dimaknai dalam upaya pencapaian tujuan  
27 Bank Indonesia.

28  
29           19. Salah satu transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan  
30 tidak terdapat di entitas lain, baik entitas komersial maupun pemerintah,  
31 adalah transaksi yang terkait dengan uang dalam peredaran. Uang dalam  
32 peredaran merupakan liabilitas Bank Indonesia, tetapi tidak menunjukkan  
33 klaim terhadap aset spesifik di Bank Indonesia dan tidak memiliki masa  
34 jatuh tempo.

35  
36           20. Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk memengaruhi uang  
37 beredar dalam rangka mencapai tujuan stabilitas nilai rupiah. Kewenangan  
38 tersebut menimbulkan liabilitas Bank Indonesia dalam mata uang rupiah  
39 yang bukan merupakan sumber pendanaan melainkan instrumen kebijakan  
40 Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan entitas komersial dan entitas  
41 pemerintah.

42  
43           21. Aset yang dimiliki Bank Indonesia terutama juga ditujukan  
44 sebagai instrumen kebijakan, tidak seperti aset di entitas komersial yang

1 ditujukan untuk sumber daya produktif dalam menghasilkan laba, atau  
2 seperti di entitas pemerintah sebagai sumber daya pendukung kegiatan dan  
3 kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, penempatan dana yang dimiliki  
4 entitas komersial ditujukan untuk memperoleh imbal hasil tertentu atau  
5 pengendalian atas entitas lain. Penempatan dana yang dimiliki entitas  
6 pemerintah juga ditujukan untuk memperoleh imbal hasil tertentu yang  
7 kemudian digunakan sebagai sumber pendanaan atas aktivitas pemerintah.  
8 Sementara itu, penempatan dana yang dimiliki Bank Indonesia terutama  
9 digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk memengaruhi nilai rupiah.

10  
11 22. Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Republik Indonesia,  
12 sesuai dengan tujuan yang diemban serta praktik yang lazim di bank sentral  
13 negara lain, mengukur seluruh transaksi dan menyajikan laporan  
14 keuangannya dalam mata uang negaranya yaitu rupiah. Namun, sebagai  
15 bagian dari upaya Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara  
16 stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia juga melaksanakan kebijakan untuk  
17 memelihara komposisi cadangan devisa tertentu dengan jumlah yang  
18 material terhadap total aset yang dimiliki Bank Indonesia. Keberadaan  
19 cadangan devisa dalam valuta asing tersebut menimbulkan dampak  
20 perhitungan nilai cadangan devisa ke dalam rupiah atau dampak  
21 perhitungan transaksi antar-valuta asing ke dalam rupiah. Hal itu  
22 menyebabkan laporan keuangan Bank Indonesia tidak dapat sepenuhnya  
23 mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi dan posisi cadangan devisa  
24 Bank Indonesia.

#### 25 26 Fungsi dan Tugas Lain Bank Indonesia

27  
28 23. Bank Indonesia mengemban beberapa fungsi dan tugas lain yang  
29 diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Fungsi dan tugas lain  
30 tersebut menyebabkan Bank Indonesia melakukan kegiatan atau transaksi  
31 tertentu yang memiliki dampak keuangan terhadap Bank Indonesia.  
32 Informasi keuangan yang terkait dengan fungsi dan tugas lain Bank  
33 Indonesia tersebut merupakan bagian dari laporan keuangan Bank  
34 Indonesia.

#### 35 36 Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang Independen

37  
38 24. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank  
39 Indonesia merupakan lembaga negara independen serta bebas dari campur  
40 tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang  
41 secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan Bank Indonesia

2  
3 25. Pengguna laporan keuangan Bank Indonesia adalah masyarakat.  
4 Anggota masyarakat pengguna laporan keuangan Bank Indonesia tersebut  
5 dapat dikelompokkan lebih lanjut menjadi wakil rakyat (Dewan Perwakilan  
6 Rakyat), lembaga pemeriksa (Badan Pemeriksa Keuangan), pemerintah,  
7 pelaku ekonomi, termasuk pelaku pasar keuangan domestik dan  
8 internasional (termasuk bank-bank), pemberi pinjaman, bank sentral lain,  
9 lembaga internasional, analis dan akademisi, serta anggota masyarakat  
10 lainnya. Mereka menggunakan laporan keuangan Bank Indonesia untuk  
11 memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Namun, pada  
12 umumnya kebutuhan informasi pengguna atas laporan keuangan Bank  
13 Indonesia adalah untuk menilai akuntabilitas manajemen Bank Indonesia  
14 dalam mencapai tujuan yang telah diamanatkan dalam peraturan  
15 perundang-undangan.

16  
17 26. Kepentingan masyarakat menjadi acuan dalam menetapkan  
18 ketentuan pelaporan keuangan Bank Indonesia. Namun, informasi yang  
19 disajikan dalam laporan keuangan Bank Indonesia bersifat umum dan tidak  
20 sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pengguna.

21  
22 27. Penanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian  
23 laporan keuangan Bank Indonesia adalah manajemen Bank Indonesia.  
24 Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam  
25 laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen  
26 dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung  
27 jawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Manajemen  
28 memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi informasi  
29 tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Meskipun  
30 demikian, pelaporan informasi manajemen dan keuangan tambahan  
31 tersebut berada di luar ruang lingkup prinsip dasar ini. Bagaimanapun juga,  
32 laporan keuangan yang diterbitkan didasarkan pada informasi yang  
33 digunakan manajemen tentang posisi keuangan dan surplus/defisit Bank  
34 Indonesia.

35  
36 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA**

37  
38 28. Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk  
39 menunjukkan pencapaian manajemen atau pertanggungjawaban  
40 manajemen dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, yang  
41 meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia  
42 terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

1           29. Laporan keuangan Bank Indonesia yang disusun untuk tujuan ini  
2 memenuhi kebutuhan informasi sebagian besar pengguna. Akan tetapi,  
3 laporan keuangan Bank Indonesia tidak menyediakan semua informasi yang  
4 mungkin diperlukan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan karena  
5 secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian pada masa  
6 lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

7  
8 **Posisi Keuangan dan Surplus/Defisit Bank Indonesia**

9  
10           30. Penilaian akuntabilitas manajemen Bank Indonesia oleh  
11 pengguna laporan keuangan Bank Indonesia memerlukan informasi tentang  
12 upaya Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya. Para pengguna dapat  
13 lebih memahami upaya Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya melalui  
14 gambaran umum dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia  
15 terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

16  
17           31. Posisi keuangan Bank Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan Bank  
18 Indonesia yang tercermin dalam sumber daya yang dikendalikan serta  
19 struktur liabilitas Bank Indonesia. Informasi sumber daya yang dikendalikan  
20 dan kemampuan Bank Indonesia dalam mengelola sumber daya pada masa  
21 lalu serta informasi tentang struktur liabilitas Bank Indonesia berguna  
22 untuk memprediksi kemampuan Bank Indonesia dalam mencapai dan  
23 memelihara stabilitas nilai rupiah.

24  
25           32. Surplus/defisit Bank Indonesia dipengaruhi oleh penghasilan dan  
26 beban Bank Indonesia pada periode tertentu. Penghasilan Bank Indonesia  
27 merupakan dampak keuangan pada periode tertentu, terutama dari  
28 pengelolaan aset dalam rangka pencapaian tujuan Bank Indonesia.  
29 Penghasilan Bank Indonesia bukan merupakan tujuan utama Bank  
30 Indonesia. Beban Bank Indonesia terutama merupakan biaya pelaksanaan  
31 kebijakan pada periode tertentu dalam rangka pencapaian tujuan Bank  
32 Indonesia, dan umumnya tidak terkait dengan perolehan penghasilan. Oleh  
33 sebab itu, informasi surplus/defisit Bank Indonesia tidak dimaksudkan  
34 untuk mencerminkan kinerja keuangan Bank Indonesia.

35  
36           33. Informasi dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia  
37 terhadap posisi keuangan terutama disediakan dalam laporan posisi  
38 keuangan. Informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank  
39 Indonesia terhadap surplus/defisit Bank Indonesia terutama disediakan  
40 dalam laporan surplus/defisit.

41  
42           34. Komponen laporan keuangan Bank Indonesia saling terkait  
43 karena mencerminkan aspek-aspek yang berbeda dari transaksi atau  
44 peristiwa lain yang sama. Meskipun setiap laporan menyediakan informasi

1 yang berbeda satu sama lain, tidak ada yang hanya dimaksudkan untuk  
2 memenuhi tujuan tunggal atau menyediakan semua informasi yang  
3 diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus pengguna. Sebagai contoh,  
4 laporan surplus/defisit menyediakan gambaran yang tidak lengkap tentang  
5 upaya Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya, kecuali jika digunakan  
6 dalam hubungannya dengan laporan posisi keuangan.

## 7 8 **Catatan dan Skedul Tambahan**

9  
10 35. Laporan keuangan juga menampung catatan dan skedul  
11 tambahan serta informasi lain. Laporan tersebut menampung informasi  
12 tambahan, keuangan dan nonkeuangan, yang relevan untuk memahami  
13 informasi yang terdapat dalam laporan posisi keuangan dan laporan  
14 surplus/defisit Bank Indonesia.

## 15 16 **ASUMSI DASAR AKUNTANSI**

### 17 18 **Dasar Akrual**

19  
20 36. Untuk mencapai tujuan, laporan keuangan disusun atas dasar  
21 akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada  
22 saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar)  
23 dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan  
24 keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun  
25 atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya  
26 transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas,  
27 tetapi juga liabilitas pembayaran kas pada masa depan serta sumber daya  
28 yang merepresentasikan kas yang akan diterima pada masa depan. Oleh  
29 karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa  
30 lalu dan peristiwa lain yang paling berguna bagi pengguna dalam  
31 pengambilan keputusan.

### 32 33 **Kelangsungan Hidup**

34  
35 37. Laporan keuangan Bank Indonesia disusun atas dasar asumsi  
36 kelangsungan hidup Bank Indonesia. Peraturan perundang-undangan  
37 menempatkan Bank Indonesia sebagai satu-satunya entitas yang  
38 menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai bank sentral di Indonesia.  
39 Sehubungan dengan fungsi dan kewenangan tersebut, Bank Indonesia tidak  
40 akan menghadapi masalah kelangsungan hidup.

1 **Periodisasi**

2  
3 38. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Bank Indonesia  
4 dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga surplus/defisit Bank  
5 Indonesia dapat diukur dan posisi keuangan Bank Indonesia dapat  
6 ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan.

7  
8 **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN**

9  
10 39. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat  
11 informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat  
12 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan  
13 dapat dibandingkan.

14  
15 **Dapat Dipahami**

16  
17 40. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat  
18 dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang  
19 disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna  
20 diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas tujuan Bank  
21 Indonesia serta dampaknya terhadap pelaporan keuangan Bank Indonesia,  
22 dan memiliki kemampuan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.  
23 Namun, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan  
24 keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa  
25 informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna  
26 tertentu.

27  
28 **Relevan**

29  
30 41. Agar informasi bermanfaat, informasi tersebut harus relevan  
31 untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan  
32 keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat memengaruhi  
33 keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa  
34 masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau memperbaiki  
35 hasil evaluasi mereka pada masa lalu.

36  
37 42. Peran informasi dalam prediksi (*predictive*) dan penegasan  
38 (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, informasi struktur  
39 dan besarnya aset yang dimiliki Bank Indonesia bermanfaat bagi pengguna  
40 ketika mereka berusaha memprediksi kemampuan Bank Indonesia dalam  
41 mencapai tujuannya pada masa yang akan datang atau ketahanan Bank  
42 Indonesia terhadap tekanan perubahan perekonomian nasional, regional,  
43 dan global. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan

1 penegasan (*confirmatory role*) terhadap kebijakan yang telah diambil oleh  
2 Bank Indonesia.

### 3 4 Kesesuaian dengan Upaya Pencapaian Tujuan Bank Indonesia

5  
6 43. Informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan Bank  
7 Indonesia adalah informasi yang mencerminkan upaya pencapaian tujuan  
8 Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia berdampak terhadap perbedaan  
9 makna ekonomi dari transaksi sejenis yang terjadi di entitas lain. Oleh sebab  
10 itu, makna informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan  
11 Bank Indonesia berbeda dengan makna informasi keuangan yang disajikan  
12 dalam laporan keuangan entitas lain.

### 13 14 Materialitas

15  
16 44. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya.  
17 Dalam beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk  
18 menentukan relevansinya. Namun, dalam kasus lain, baik hakikat maupun  
19 materialitas, keduanya dipandang penting.

20  
21 45. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk  
22 mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat  
23 memengaruhi keputusan pengguna yang diambil atas dasar laporan  
24 keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang  
25 dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan  
26 (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Oleh karena itu,  
27 materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah  
28 daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar  
29 informasi dipandang berguna.

### 30 31 Ketepatan Waktu

32  
33 46. Informasi yang relevan adalah informasi yang disajikan tepat  
34 waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan  
35 keputusan.

### 36 37 **Andal**

38  
39 47. Informasi juga harus andal (*reliable*) agar bermanfaat. Informasi  
40 memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan,  
41 kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian  
42 yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang  
43 secara wajar diharapkan dapat disajikan.

1           48. Suatu informasi boleh jadi relevan, tetapi jika hakikat atau  
 2 penyajiannya tidak dapat diandalkan, penggunaan informasi tersebut secara  
 3 potensial dapat menyesatkan. Sebagai contoh, jika keabsahan dan jumlah  
 4 tuntutan atas penempatan dana Bank Indonesia pada surat berharga  
 5 pemerintah asing dari suatu negara yang mengalami kesulitan keuangan  
 6 masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi Bank Indonesia untuk  
 7 mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam laporan posisi keuangan  
 8 meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari  
 9 tuntutan tersebut.

10  
 11 Pertimbangan Sehat

12  
 13           49. Penyusun laporan keuangan ada kalanya menghadapi  
 14 ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut  
 15 diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan  
 16 menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan  
 17 keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat  
 18 melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau  
 19 penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan liabilitas atau beban tidak  
 20 dinyatakan terlalu rendah. Meskipun demikian, penggunaan pertimbangan  
 21 sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan  
 22 tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja  
 23 menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan  
 24 liabilitas atau beban yang lebih tinggi sehingga laporan keuangan menjadi  
 25 tidak netral yang mengakibatkan tidak memiliki kualitas andal.

26  
 27 Penyajian Jujur

28  
 29           50. Suatu informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi  
 30 serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat  
 31 diharapkan untuk disajikan agar informasi tersebut dapat diandalkan.  
 32 Sebagai contoh, laporan posisi keuangan harus menggambarkan dengan  
 33 jujur transaksi serta peristiwa lain dalam bentuk aset dan liabilitas Bank  
 34 Indonesia pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

35  
 36           51. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko  
 37 penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya  
 38 digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan oleh kesengajaan untuk  
 39 menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam  
 40 mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lain yang dilaporkan, atau  
 41 dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang  
 42 sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus  
 43 tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti  
 44 sehingga Bank Indonesia tidak mengakuinya dalam laporan keuangan.

1 Sebagai contoh, meskipun pencapaian tujuan Bank Indonesia dapat  
2 menghasilkan *goodwill* dalam bentuk kredibilitas Bank Indonesia, lazimnya  
3 sulit untuk mengidentifikasi atau mengukur *goodwill* tersebut secara andal.  
4 Namun, dalam kasus lain, pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap  
5 relevan dengan mengungkapkan risiko kesalahan sehubungan dengan  
6 pengakuan dan pengukurannya.

#### 7 8 Substansi Mengungguli Bentuk

9  
10 52. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi  
11 serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Dengan demikian, transaksi  
12 atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan  
13 substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.  
14 Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda  
15 dengan aspek formalitasnya, hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas  
16 dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 17 18 Netralitas

19  
20 53. Informasi harus ditujukan pada kebutuhan umum pengguna dan  
21 tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh  
22 ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa  
23 pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai  
24 kepentingan yang berlawanan.

#### 25 26 Kelengkapan

27  
28 54. Suatu informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam  
29 batasan materialitas dan biaya agar informasi tersebut dapat diandalkan.  
30 Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan  
31 informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan sehingga tidak dapat  
32 diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

#### 33 34 **Dapat Dibandingkan**

35  
36 55. Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan Bank  
37 Indonesia antar-periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi  
38 keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia. Oleh karena itu, pengukuran  
39 dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang  
40 serupa harus dilakukan secara konsisten antar-periode.

41  
42 56. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif yang dapat  
43 diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi  
44 tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan

1 keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.  
 2 Para pengguna harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi  
 3 perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta  
 4 peristiwa lain yang sama di Bank Indonesia dari satu periode ke periode lain.  
 5 Ketaatan pada kebijakan akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan  
 6 kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Bank Indonesia, membantu  
 7 pencapaian daya banding akuntansi dan pelaporan keuangan Bank  
 8 Indonesia.

9  
 10 57. Kebutuhan terhadap daya banding tidak boleh menempatkan  
 11 keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam  
 12 memperkenalkan kebijakan akuntansi keuangan yang lebih baik. Bank  
 13 Indonesia tidak perlu mempertahankan kebijakan akuntansi yang dipilih  
 14 manajemen apabila yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif  
 15 relevansi dan keandalan. Bank Indonesia juga tidak perlu mempertahankan  
 16 suatu kebijakan akuntansi yang dipilih manajemen jika ada alternatif lain  
 17 yang lebih relevan dan lebih andal.

18  
 19 58. Bank Indonesia perlu menyajikan informasi periode sebelumnya  
 20 dalam laporan keuangan karena pengguna ingin membandingkan dampak  
 21 keuangan dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi  
 22 keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia antar-periode.

## 23 **Kendala Informasi yang Relevan dan Andal**

### 24 Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

25  
 26  
 27  
 28 59. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan  
 29 kendala yang pervasif (meluas) daripada karakteristik kualitatif. Manfaat  
 30 yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya serta  
 31 biaya yang mungkin timbul dari penyajian informasi tersebut (misalnya  
 32 penyajian informasi tertentu dapat dimanfaatkan oleh pihak dan atau  
 33 kepentingan tertentu sehingga menghambat upaya pencapaian tujuan Bank  
 34 Indonesia atau menimbulkan kerugian bagi kepentingan publik). Meskipun  
 35 demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang  
 36 substansial. Biaya tersebut juga tidak harus ditanggung oleh pengguna  
 37 informasi yang mendapat manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh  
 38 pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi. Karena  
 39 alasan itulah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada  
 40 kasus tertentu. Komite penyusun kebijakan akuntansi keuangan Bank  
 41 Indonesia, Bank Indonesia, dan para pengguna laporan keuangan Bank  
 42 Indonesia harus menyadari kendala tersebut.

1 Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

2  
 3 60. Keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik  
 4 kualitatif sering diperlukan dalam praktik. Pada umumnya tujuannya  
 5 adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai  
 6 karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif  
 7 dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan  
 8 masalah pertimbangan profesional.

9  
 10 61. Salah satu *trade-off* yang dapat terjadi adalah dalam upaya  
 11 menyajikan informasi yang andal dan tepat waktu. Jika terdapat penundaan  
 12 yang tidak semestinya dalam pelaporan, informasi yang dihasilkan akan  
 13 kehilangan relevansi. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat  
 14 relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk  
 15 menyediakan informasi tepat waktu, manajemen sering kali perlu  
 16 melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lain diketahui  
 17 sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan  
 18 ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan  
 19 mungkin sangat andal, tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan.  
 20 Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan,  
 21 kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang  
 22 menentukan.

23  
 24 Keterbatasan Nilai Prediksi

25  
 26 62. Perubahan perekonomian nasional, regional, dan global  
 27 berpengaruh terhadap kebijakan Bank Indonesia, kemampuan ekonomis  
 28 sumber daya keuangan Bank Indonesia, serta dampak keuangan dari  
 29 kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Oleh sebab itu, daya  
 30 prediksi dari informasi pada laporan keuangan Bank Indonesia sensitif  
 31 terhadap perubahan situasi perekonomian tersebut. Pengguna harus  
 32 menyadari keterbatasan nilai prediksi pada saat menggunakan laporan  
 33 keuangan Bank Indonesia dalam mengambil keputusan.

34  
 35 **Penyajian Wajar**

36  
 37 63. Laporan keuangan Bank Indonesia menggambarkan pandangan  
 38 yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, dampak keuangan dari  
 39 kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit  
 40 Bank Indonesia. Meskipun prinsip dasar ini tidak menangani secara  
 41 langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan  
 42 kebijakan akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan  
 43 keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai

1 suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi  
2 semacam itu.

3

#### 4 **UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

5

6 64. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari  
7 transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok  
8 besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar tersebut  
9 merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung  
10 dengan pengukuran posisi keuangan Bank Indonesia adalah aset dan  
11 liabilitas. Sementara itu, unsur yang berkaitan dengan surplus/defisit Bank  
12 Indonesia adalah penghasilan dan beban.

13

14 65. Penyajian berbagai unsur ini dalam laporan posisi keuangan dan  
15 laporan surplus/defisit Bank Indonesia memerlukan proses subklasifikasi.  
16 Subklasifikasi unsur laporan keuangan akan meningkatkan kemampuan  
17 pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi keuangan Bank  
18 Indonesia.

19

#### 20 **Posisi Keuangan**

21

22 66. Unsur posisi keuangan adalah aset dan liabilitas. Pos-pos ini  
23 didefinisikan sebagai berikut.

- 24 (a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh Bank Indonesia sebagai  
25 akibat peristiwa masa lalu dan mencerminkan hak Bank Indonesia  
26 untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam upaya mencapai dan  
27 memelihara stabilitas nilai rupiah yang berdampak ekonomi dan sosial  
28 kepada masyarakat dan perekonomian nasional.
- 29 (b) Liabilitas adalah klaim kini terhadap Bank Indonesia dengan  
30 karakteristik yang berbeda-beda yang timbul dari peristiwa masa lalu.

31

32 67. Definisi dari aset dan liabilitas mengidentifikasi ciri  
33 esensialnya, tetapi tidak mencoba untuk menetapkan kriteria spesifik yang  
34 perlu dipenuhi sebelum diakui dalam laporan posisi keuangan. Oleh sebab  
35 itu, definisi tersebut juga mencakup pos-pos yang tidak diakui sebagai  
36 unsur dalam laporan posisi keuangan karena tidak memenuhi kriteria untuk  
37 diakui seperti yang dibahas dalam paragraf 102 sampai dengan 123.  
38 Khususnya, harapan bahwa manfaat ekonomi pada masa depan akan  
39 mengalir dari atau ke dalam Bank Indonesia harus cukup pasti untuk  
40 memenuhi kriteria probabilitas dalam paragraf 103 sebelum suatu aset atau  
41 liabilitas diakui.

1           68. Dalam penilaian apakah suatu pos memenuhi definisi unsur  
2 laporan keuangan, perhatian perlu ditujukan pada substansi yang  
3 mendasari serta realitas ekonomi, dan bukan hanya bentuk hukumnya.

4  
5           69. Laporan posisi keuangan yang disusun menurut pernyataan  
6 kebijakan akuntansi keuangan yang berlaku dapat meliputi pos yang tidak  
7 memenuhi definisi aset atau liabilitas. Meskipun demikian, definisi yang  
8 dirumuskan dalam paragraf 66 akan mendasari peninjauan kembali  
9 terhadap pernyataan kebijakan akuntansi keuangan yang berlaku pada  
10 masa depan dan perumusan pernyataan kebijakan selanjutnya.

11  
12 Aset

13  
14           70. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset Bank  
15 Indonesia adalah potensi aset tersebut, baik secara langsung maupun tidak  
16 langsung, digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia untuk  
17 mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Potensi tersebut dapat  
18 berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas  
19 Bank Indonesia. Manfaat tersebut dapat juga berbentuk sesuatu yang dapat  
20 digunakan sebagai instrumen kebijakan atau berbentuk kredibilitas yang  
21 dapat membantu keefektifan pencapaian tujuan.

22  
23           71. Bank Indonesia menggunakan aset, terutama sebagai instrumen  
24 pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, untuk mencapai dan memelihara  
25 stabilitas nilai rupiah.

26  
27           72. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset Bank  
28 Indonesia dapat diperoleh melalui beberapa cara, misalnya aset dapat:

- 29 (a) digunakan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia;  
30 (b) dipertukarkan dengan aset lain dalam pelaksanaan tugas Bank  
31 Indonesia; dan  
32 (c) digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.

33  
34           73. Banyak aset memiliki bentuk fisik. Namun, bentuk fisik tersebut  
35 tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Oleh karena itu, aset yang  
36 tidak memiliki bentuk fisik merupakan aset bagi Bank Indonesia jika  
37 memberikan manfaat ekonomi pada masa depan dan tiap-tiap aset tersebut  
38 dikuasai Bank Indonesia.

39  
40           74. Banyak aset, dihubungkan dengan hak menurut hukum,  
41 termasuk hak milik. Dalam menentukan eksistensi aset, hak milik ada  
42 kalanya tidak esensial. Meskipun kemampuan Bank Indonesia untuk  
43 mengendalikan manfaat biasanya berasal dari hak menurut hukum, suatu

1 barang atau jasa dapat memenuhi definisi aset meskipun tidak dikuasai  
2 berdasarkan hukum.

3  
4 75. Aset Bank Indonesia berasal dari transaksi atau peristiwa lain  
5 yang terjadi pada masa lalu. Bank Indonesia biasanya memperoleh aset  
6 melalui pembelian, hibah, konversi aset ke aset lain, pengembangan sendiri,  
7 atau berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. Transaksi atau  
8 peristiwa yang diharapkan terjadi pada masa depan tidak dengan sendirinya  
9 memunculkan aset. Oleh karena itu, misalnya, maksud Bank Indonesia  
10 untuk membeli aset tertentu tidak dengan sendirinya memenuhi definisi  
11 aset.

12  
13 76. Ada hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan timbulnya  
14 aset, tetapi kedua peristiwa ini tidak harus terjadi bersamaan. Oleh karena  
15 itu, apabila Bank Indonesia melakukan pengeluaran, peristiwa ini  
16 memberikan bukti bahwa Bank Indonesia mengejar manfaat ekonomi, tetapi  
17 belum merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang  
18 memenuhi definisi aset telah diperoleh. Sama halnya dengan tidak adanya  
19 pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau  
20 jasa memenuhi definisi aset dan dengan demikian terdapat kemungkinan  
21 untuk diakui pencantumannya dalam laporan posisi keuangan. Sebagai  
22 contoh, hibah yang diterima oleh Bank Indonesia memenuhi definisi aset.

23  
24 Liabilitas

25  
26 77. Liabilitas Bank Indonesia terutama terdiri dari uang dalam  
27 peredaran, liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia,  
28 selisih revaluasi, modal, dan akumulasi surplus/defisit.

29  
30 78. Uang dalam peredaran adalah uang rupiah yang dinyatakan  
31 sebagai alat pembayaran yang sah yang tidak dalam penguasaan Bank  
32 Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang  
33 berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut,  
34 dan menarik uang yang dimaksud dari peredaran.

35  
36 79. Liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia  
37 mencerminkan potensi meningkatnya liabilitas lain dan/atau potensi  
38 menurunnya sumber daya yang dimiliki Bank Indonesia pada masa depan  
39 yang timbul dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada masa lalu.  
40 Sebagai contoh, liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank  
41 Indonesia adalah instrumen moneter berbasis utang, baik rupiah maupun  
42 valuta asing, giro bank, dan giro pemerintah di Bank Indonesia.

1           80. Karakteristik esensial dari liabilitas lainnya dari pelaksanaan  
 2 kebijakan Bank Indonesia adalah bahwa Bank Indonesia mempunyai  
 3 kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau  
 4 tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan  
 5 cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai  
 6 konsekuensi kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan.  
 7 Namun, kewajiban juga dapat timbul dari substansi transaksi yang  
 8 memenuhi definisi liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank  
 9 Indonesia.

10  
 11           81. Kewajiban kini berbeda dengan komitmen pada masa depan.  
 12 Keputusan manajemen Bank Indonesia untuk membeli instrumen keuangan  
 13 pada masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini.  
 14 Kewajiban biasanya timbul hanya jika aset telah diserahkan atau Bank  
 15 Indonesia telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk  
 16 membeli aset. Hakikat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan berarti bahwa  
 17 konsekuensi ekonomi dari kegagalan untuk memenuhi kewajiban, misalnya,  
 18 karena adanya hukuman yang substansial, membuat Bank Indonesia  
 19 memiliki sedikit pilihan untuk mencegah pengeluaran sumber daya kepada  
 20 pihak lain.

21  
 22           82. Kewajiban kini Bank Indonesia dalam mata uang rupiah pada  
 23 umumnya diselesaikan dengan penggantian kewajiban tersebut dengan  
 24 kewajiban lain. Penyelesaian kewajiban kini Bank Indonesia dalam valuta  
 25 asing pada umumnya dilakukan dengan penyerahan valuta asing.  
 26 Penyelesaian kewajiban mungkin saja dilakukan dengan pembayaran uang  
 27 rupiah. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti lembaga  
 28 pemberi pinjaman membebaskan atau membatalkan haknya.

29  
 30           83. Liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia  
 31 timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Sebagai contoh, penerbitan  
 32 instrumen kebijakan dalam bentuk instrumen utang menimbulkan liabilitas  
 33 keuangan, dan penerimaan pinjaman menimbulkan liabilitas untuk  
 34 membayar kembali pinjaman tersebut.

35  
 36           84. Beberapa jenis liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank  
 37 Indonesia hanya dapat diukur dengan menggunakan estimasi dalam derajat  
 38 yang substansial. Liabilitas ini disebut sebagai provisi. Jika provisi tersebut  
 39 terkait dengan kewajiban kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi  
 40 liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, maka pos  
 41 yang bersangkutan merupakan liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan  
 42 Bank Indonesia meskipun jumlahnya harus diestimasi.

1           85. Selisih revaluasi mencerminkan perubahan kumulatif nilai wajar  
2 aset dan liabilitas Bank Indonesia atau dampak keuangan dari transaksi  
3 unik Bank Indonesia yang belum mencapai tujuan akhir pelaksanaan  
4 transaksi tersebut.

5  
6           86. Modal adalah modal Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan  
7 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8  
9           87. Akumulasi surplus/defisit adalah surplus/defisit yang berasal  
10 dari periode berjalan dan periode-periode sebelumnya.

11  
12 **Surplus/Defisit**

13  
14           88. Unsur laporan surplus/defisit adalah penghasilan dan beban.  
15 Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban Bank Indonesia  
16 dipengaruhi oleh penerapan akuntabilitas manajemen Bank Indonesia dalam  
17 rangka melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Bank Indonesia. Oleh  
18 sebab itu, pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban Bank  
19 Indonesia mempertimbangkan konsep kesesuaian dengan upaya pencapaian  
20 tujuan Bank Indonesia seperti dijelaskan pada paragraf 43.

21  
22           89. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut.

- 23 (a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu  
24 periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset  
25 atau penurunan liabilitas, yang mengakibatkan kenaikan akumulasi  
26 surplus/defisit, yang tidak berasal dari penambahan modal.  
27 (b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu  
28 periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset  
29 atau terjadinya liabilitas, yang mengakibatkan penurunan akumulasi  
30 surplus/defisit.

31  
32           90. Penghasilan dan beban yang memenuhi definisi pada paragraf 89  
33 adalah penghasilan dan beban yang berasal dari transaksi yang telah  
34 direalisasi dan transaksi unik Bank Indonesia yang telah mencapai tujuan  
35 akhir dari pelaksanaan transaksi tersebut.

36  
37           91. Definisi penghasilan dan beban mengidentifikasi ciri-ciri  
38 esensial tetapi tidak mencoba untuk mengidentifikasi kriteria yang perlu  
39 dipenuhi sebelum diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia.  
40 Kriteria pengakuan penghasilan dan beban dibahas dalam paragraf 102  
41 sampai dengan 123.

42  
43           92. Penghasilan dan beban dapat disajikan dalam laporan  
44 surplus/defisit Bank Indonesia dengan beberapa cara yang berbeda untuk

1 menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Dalam  
 2 hal ini, penghasilan dan beban pada laporan surplus/defisit Bank Indonesia  
 3 dikelompokkan berdasarkan karakteristik khusus Bank Indonesia sebagai  
 4 bank sentral.

5  
 6 Penghasilan

7  
 8 93. Definisi penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*)  
 9 ataupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan  
 10 aktivitas normal Bank Indonesia, seperti pendapatan bunga dan pendapatan  
 11 jasa perbankan.

12  
 13 94. Keuntungan mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi  
 14 penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam  
 15 pelaksanaan aktivitas normal Bank Indonesia. Keuntungan mencerminkan  
 16 kenaikan manfaat ekonomi. Dengan demikian pada hakikatnya keuntungan  
 17 tidak berbeda dari pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak  
 18 dipandang sebagai unsur terpisah dalam prinsip dasar ini.

19  
 20 95. Definisi penghasilan dalam laporan surplus/defisit Bank  
 21 Indonesia tidak mencakup keuntungan yang belum direalisasi, seperti yang  
 22 timbul dari perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia, atau  
 23 dampak keuangan dari transaksi unik Bank Indonesia yang belum mencapai  
 24 tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.

25  
 26 96. Keuntungan yang diakui dalam laporan surplus/defisit Bank  
 27 Indonesia dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut  
 28 berguna dalam pengambilan keputusan, kecuali tidak material. Keuntungan  
 29 dilaporkan dalam jumlah bruto, sebelum dikurangi dengan beban yang  
 30 bersangkutan, kecuali tidak material.

31  
 32 97. Berbagai jenis aset dapat diterima atau bertambah karena  
 33 penghasilan. Penghasilan dapat juga berasal dari penyelesaian liabilitas  
 34 lainnya dari kebijakan Bank Indonesia.

35  
 36 Beban

37  
 38 98. Definisi beban meliputi baik beban yang timbul dalam  
 39 pelaksanaan aktivitas normal Bank Indonesia ataupun kerugian. Beban  
 40 yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal Bank Indonesia meliputi,  
 41 misalnya, beban pengendalian moneter, beban jasa giro pemerintah, dan  
 42 beban gaji. Beban tersebut biasanya berbentuk bertambahnya liabilitas,  
 43 seperti giro atau uang dalam peredaran.

1            99. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban  
 2 yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas normal Bank  
 3 Indonesia. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat  
 4 ekonomi, dan pada hakikatnya tidak berbeda dari beban lain. Oleh karena  
 5 itu, kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam prinsip dasar  
 6 ini.

7  
 8            100. Definisi beban dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia  
 9 tidak mencakup kerugian yang belum direalisasi, yang timbul dari  
 10 perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia atau dampak  
 11 keuangan dari transaksi unik Bank Indonesia yang belum mencapai tujuan  
 12 akhir pelaksanaan transaksi tersebut.

13  
 14            101. Kerugian yang diakui dalam laporan surplus/defisit Bank  
 15 Indonesia dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut  
 16 berguna dalam pengambilan keputusan. Kerugian dilaporkan dalam jumlah  
 17 bruto, sebelum dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan, kecuali  
 18 tidak material.

19  
 20 **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

21  
 22            102. Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu  
 23 pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang  
 24 dikemukakan dalam paragraf 103 dalam laporan posisi keuangan atau  
 25 laporan surplus/defisit Bank Indonesia. Pengakuan dilakukan dengan  
 26 menyatakan pos tersebut, baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah  
 27 uang, dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau  
 28 laporan surplus/defisit Bank Indonesia. Pos yang memenuhi kriteria  
 29 tersebut harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan  
 30 surplus/defisit Bank Indonesia. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu  
 31 tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang  
 32 digunakan ataupun melalui catatan atau materi penjelasan.

33  
 34            103. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui apabila:  
 35 (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos  
 36 tersebut akan mengalir dari atau ke dalam Bank Indonesia dan  
 37 perekonomian nasional; dan  
 38 (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan  
 39 andal.

40  
 41            104. Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini  
 42 sehingga memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan posisi keuangan  
 43 atau laporan surplus/defisit Bank Indonesia, perhatian perlu ditujukan  
 44 pada pertimbangan materialitas yang dibahas dalam paragraf 44 dan 45.

1 Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi  
 2 dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu, contohnya, suatu aset, secara  
 3 otomatis memerlukan pengakuan unsur lain, contohnya, penghasilan atau  
 4 liabilitas.

5  
 6 **Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan dan Kesesuaian Manfaat**  
 7 **Ekonomi dengan Upaya Pencapaian Tujuan Bank Indonesia**

8  
 9 105. Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep probabilitas  
 10 digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi  
 11 masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke  
 12 dalam Bank Indonesia dan perekonomian nasional. Konsep tersebut  
 13 dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi Bank  
 14 Indonesia. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus  
 15 manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada  
 16 saat penyusunan laporan keuangan.

17  
 18 106. Dalam kriteria pengakuan penghasilan seperti pada paragraf 103  
 19 huruf a, upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia dapat memengaruhi  
 20 penentuan waktu realisasi transaksi, yaitu saat manfaat ekonomi yang  
 21 berkaitan dengan pos tertentu mengalir dari atau ke dalam Bank Indonesia  
 22 dan perekonomian nasional. Realisasi transaksi atau mengalirnya manfaat  
 23 ekonomi dari atau ke dalam sebuah entitas terjadi ketika tujuan akhir  
 24 transaksi telah tercapai. Pada umumnya tujuan akhir transaksi telah  
 25 tercapai saat transaksi dilaksanakan. Namun, berbagai upaya Bank  
 26 Indonesia dapat menyebabkan tujuan akhir transaksi belum tercapai saat  
 27 transaksi dilaksanakan. Hal itu disebabkan oleh upaya yang dilakukan  
 28 Bank Indonesia dapat dimaksudkan secara langsung atau tidak langsung  
 29 memengaruhi stabilitas nilai rupiah. Jika upaya yang dilakukan Bank  
 30 Indonesia dimaksudkan secara langsung memengaruhi stabilitas nilai  
 31 rupiah, maka tujuan akhir dari transaksi terkait upaya tersebut pada  
 32 umumnya telah tercapai saat transaksi dilaksanakan. Namun, jika upaya  
 33 yang dilakukan Bank Indonesia tidak dimaksudkan secara langsung  
 34 memengaruhi stabilitas nilai rupiah, maka tujuan akhir dari transaksi  
 35 terkait upaya tersebut pada umumnya belum tercapai saat transaksi  
 36 dilaksanakan.

37  
 38 107. Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat melakukan transaksi yang  
 39 menimbulkan liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia  
 40 berupa kewajiban pembayaran bunga atas penerbitan instrumen utang yang  
 41 dilakukan Bank Indonesia dalam memengaruhi jumlah uang beredar.  
 42 Transaksi tersebut merupakan konsekuensi kebijakan Bank Indonesia yang  
 43 dimaksudkan secara langsung memengaruhi stabilitas nilai rupiah. Oleh  
 44 sebab itu, tujuan akhir transaksi telah tercapai pada saat transaksi tersebut

1 dilaksanakan yang bersamaan dengan timbulnya kewajiban pembayaran  
2 bunga. Contoh lain, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan transaksi  
3 antar valuta asing untuk mempertahankan komposisi cadangan devisa.  
4 Komposisi cadangan devisa tersebut menunjang upaya Bank Indonesia  
5 dalam mencapai dan memelihara nilai rupiah pada masa yang akan datang.  
6 Namun, kebijakan tersebut bersifat jangka panjang sampai tidak lagi  
7 merupakan bagian dari komposisi cadangan devisa dan dikonversikan  
8 menjadi rupiah. Oleh sebab itu, maksud transaksi antar-valuta asing dalam  
9 rangka mempertahankan komposisi cadangan devisa belum mencerminkan  
10 tujuan akhir transaksi tersebut. Tujuan akhir transaksi tersebut tercapai  
11 ketika cadangan devisa digunakan sebagai instrumen kebijakan dalam  
12 memengaruhi nilai rupiah.

13

### 14 **Keandalan Pengukuran**

15

16 108. Kriteria pengakuan suatu pos yang kedua adalah ada tidaknya  
17 biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan (*reliable*)  
18 tertentu seperti yang dibahas pada paragraf 47 sampai dengan paragraf 54  
19 prinsip dasar ini. Pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi.  
20 Penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam  
21 penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan.  
22 Namun, jika estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, pos tersebut  
23 tidak diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan surplus/defisit  
24 Bank Indonesia. Sebagai contoh, hasil yang diharapkan dari suatu tuntutan  
25 hukum dapat memenuhi definisi, baik aset dan penghasilan maupun kriteria  
26 probabilitas untuk dapat diakui. Namun demikian, jika tidak mungkin  
27 diukur dengan tingkat keandalan tertentu, tuntutan tersebut tidak dapat  
28 diakui sebagai aset atau sebagai penghasilan. Meskipun demikian,  
29 eksistensi tuntutan harus diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan,  
30 atau skedul tambahan.

31

32 109. Suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria  
33 pengakuan dalam paragraf 103 dapat memenuhi syarat untuk diakui pada  
34 masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi  
35 kemudian.

36

37 110. Suatu pos yang memiliki karakteristik esensial suatu unsur,  
38 tetapi tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan tetap, perlu diungkapkan  
39 dalam catatan, materi penjelasan, atau skedul tambahan. Pengungkapan  
40 tersebut dapat dibenarkan apabila pengetahuan mengenai pos tersebut  
41 dipandang relevan untuk mengevaluasi posisi keuangan dan surplus/defisit  
42 Bank Indonesia oleh pengguna laporan keuangan.

1 **Pengakuan Aset**

2

3 111. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan apabila besar  
4 kemungkinan bahwa manfaat ekonomi pada masa depan diperoleh Bank  
5 Indonesia dan/atau perekonomian nasional serta aset tersebut mempunyai  
6 nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

7

8 112. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan apabila  
9 pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonomi dipandang tidak mungkin  
10 mengalir ke dalam Bank Indonesia dan/atau perekonomian nasional setelah  
11 periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif, transaksi semacam itu  
12 menimbulkan pengakuan beban dalam laporan surplus/defisit Bank  
13 Indonesia. Dengan perlakuan itu, tidak berarti pengeluaran yang dilakukan  
14 manajemen mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan manfaat  
15 ekonomi bagi Bank Indonesia pada masa depan atau bahwa manajemen  
16 salah arah. Konsekuensi satu-satunya adalah bahwa tingkat kepastian dari  
17 manfaat ekonomi yang diterima Bank Indonesia setelah periode akuntansi  
18 berjalan tidak mencukupi untuk membenarkan pengakuan aset.

19

20 **Pengakuan Uang dalam Peredaran**

21

22 113. Uang dalam peredaran diakui dalam laporan posisi keuangan  
23 sepanjang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak dalam  
24 penguasaan Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

25

26 **Pengakuan Liabilitas Lainnya dari Pelaksanaan Kebijakan Bank**  
27 **Indonesia**

28

29 114. Liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia  
30 diakui dalam laporan posisi keuangan apabila besar kemungkinan akan  
31 menimbulkan liabilitas lain pada masa yang akan datang atau akan  
32 menimbulkan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat  
33 ekonomi pada masa yang akan datang untuk menyelesaikan kewajiban  
34 (*obligation*) kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan  
35 andal. Dalam praktik, kewajiban menurut kontrak yang belum dilaksanakan  
36 oleh kedua belah pihak pada umumnya tidak diakui sebagai liabilitas dalam  
37 laporan keuangan. Namun, kewajiban semacam itu dapat memenuhi definisi  
38 liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, dan apabila  
39 dalam keadaan tertentu kriteria pengakuan terpenuhi, maka kewajiban  
40 tersebut dapat dianggap memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini,  
41 pengakuan liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia  
42 mengakibatkan pengakuan aset atau beban yang bersangkutan.

1 **Pengakuan Selisih Revaluasi**

2  
3 115. Selisih revaluasi diakui apabila terjadi perubahan nilai wajar aset  
4 dan liabilitas Bank Indonesia dan/atau perubahan nilai rupiah dari aset dan  
5 liabilitas Bank Indonesia dalam valuta asing, dan/atau terjadi keuntungan  
6 dan kerugian dari transaksi unik Bank Indonesia yang substansi tujuan  
7 ekonominya belum tercapai pada saat transaksi tersebut dilaksanakan,  
8 seperti selisih penjabaran mata uang sebagai dampak penyesuaian  
9 komposisi aset valuta asing.

10  
11 **Pengakuan Modal**

12  
13 116. Modal diakui pada saat ditetapkan sesuai dengan peraturan  
14 perundang-undangan

15  
16 **Pengakuan Penghasilan**

17  
18 117. Penghasilan diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia  
19 apabila kenaikan manfaat ekonomi pada masa depan yang berkaitan dengan  
20 kenaikan aset, penurunan liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan  
21 Bank Indonesia, dan realisasi selisih revaluasi, yang mengakibatkan  
22 kenaikan akumulasi surplus/defisit, telah terjadi atau telah mencapai  
23 tujuan akhir transaksi serta dapat diukur dengan andal.

24  
25 118. Prosedur yang lazim dianut dalam praktik untuk mengakui  
26 penghasilan, seperti ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh,  
27 merupakan penerapan kriteria pengakuan dalam prinsip dasar ini. Prosedur  
28 semacam ini pada umumnya dimaksudkan untuk membatasi pengakuan  
29 penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan andal dan memiliki  
30 derajat kepastian yang cukup.

31  
32 **Pengakuan Beban**

33  
34 119. Beban diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia  
35 apabila penurunan manfaat ekonomi pada masa depan yang berkaitan  
36 dengan penurunan aset, kenaikan liabilitas lainnya dari pelaksanaan  
37 kebijakan Bank Indonesia, dan realisasi selisih revaluasi, yang  
38 mengakibatkan penurunan akumulasi surplus/defisit, telah terjadi atau  
39 telah mencapai tujuan akhir transaksi serta dapat diukur dengan andal.

40  
41 120. Prinsip *matching cost against revenue* dalam akuntansi Bank  
42 Indonesia tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam  
43 akuntansi komersial.

1 121. Beban yang memberikan manfaat lebih dari satu periode  
 2 akuntansi dapat diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia atas  
 3 dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal itu sering  
 4 diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan  
 5 aset. Dalam kasus semacam itu, beban itu disebut penyusutan atau  
 6 amortisasi. Prosedur alokasi tersebut dimaksudkan untuk mengakui beban  
 7 dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aset yang  
 8 bersangkutan.

9  
 10 122. Beban segera diakui dalam laporan surplus/defisit Bank  
 11 Indonesia apabila pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa  
 12 depan atau apabila sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak  
 13 memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam  
 14 laporan posisi keuangan sebagai aset.

15  
 16 123. Beban juga diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia  
 17 pada saat timbul liabilitas tanpa adanya pengakuan aset.

18  
 19 **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

20  
 21 124. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk  
 22 mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan  
 23 posisi keuangan dan laporan surplus/defisit Bank Indonesia. Proses itu  
 24 menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu untuk mencerminkan  
 25 nilai wajar setiap unsur laporan keuangan. Nilai wajar adalah nilai aset yang  
 26 dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas yang diselesaikan antara pihak  
 27 yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's*  
 28 *length transaction*).

29  
 30 125. Secara konseptual terdapat dua model dasar pengukuran yang  
 31 dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia,  
 32 yaitu:

- 33 (a) model akuntansi historis (*historical accounting model*); dan  
 34 (b) model akuntansi nilai kini (*current value accounting model*).

35  
 36 126. Pada model akuntansi historis, pengukuran setiap unsur laporan  
 37 keuangan, baik pengukuran awal maupun pengukuran setelah pengakuan  
 38 awal, menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Aset dicatat sebesar  
 39 pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari  
 40 imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut  
 41 pada saat perolehan. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai  
 42 penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu, dalam

1 jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk  
 2 memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal.

3

4 127. Pada model akuntansi nilai kini, pengukuran setiap unsur  
 5 laporan keuangan menggunakan nilai wajar kini. Pada saat pengakuan awal,  
 6 nilai wajar kini tersebut tidak berbeda dengan nilai wajar perolehan atau  
 7 biaya historis. Namun, setelah pengakuan awal, nilai wajar kini dari unsur  
 8 laporan keuangan dapat berbeda dari nilai wajar saat perolehan. Berbagai  
 9 dasar pengukuran nilai wajar kini yang dapat digunakan adalah sebagai  
 10 berikut.

11 (a) Biaya kini (*current cost* atau *entry price* atau *replacement cost*). Aset  
 12 dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar  
 13 apabila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Liabilitas  
 14 dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak  
 15 didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk  
 16 menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.

17 (b) Nilai realisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value* atau *exit price*  
 18 atau *selling price*). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas)  
 19 yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan  
 20 normal (*orderly disposal*). Liabilitas dinyatakan sebesar nilai  
 21 penyelesaian, yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak  
 22 didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi  
 23 liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

24 (c) Nilai sekarang (*present value* atau *discounted present value*). Aset  
 25 dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih pada masa depan yang  
 26 didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat  
 27 memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Liabilitas  
 28 dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih pada masa depan yang  
 29 didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan  
 30 untuk menyelesaikan liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

1 ***Material Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam***  
2 ***mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara***  
3 ***sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi***  
4 ***pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran***  
5 ***dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam***  
6 ***mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran***  
7 ***atau sifat dari pos laporan keuangan, atau gabungan dari keduanya,***  
8 ***dapat menjadi faktor penentu.***

9  
10 ***Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) adalah pengaturan***  
11 ***kebijakan akuntansi keuangan yang meliputi pengakuan,***  
12 ***pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk setiap kelompok***  
13 ***transaksi keuangan dan peristiwa yang berpengaruh terhadap***  
14 ***kondisi keuangan BI yang dikeluarkan oleh Komite Penyusun***  
15 ***Kebijakan Akuntansi Keuangan BI.***

16  
17 ***Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK)***  
18 ***adalah bangunan kerangka berpikir dalam menentukan antara lain***  
19 ***tujuan, unsur, karakteristik kualitatif, konsep dasar, asumsi, serta***  
20 ***keterbatasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BI,***  
21 ***termasuk pedoman adopsi standar akuntansi keuangan yang berlaku***  
22 ***umum.***

23  
24 ***Standar akuntansi umum (SAU) adalah pernyataan dan interpretasi***  
25 ***yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan***  
26 ***Akuntan Indonesia.***

27  
28 ***Standar akuntansi syariah (SAS) adalah pernyataan dan interpretasi***  
29 ***yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan***  
30 ***Akuntan Indonesia.***

31  
32 04. Penilaian apakah suatu kelalaian untuk mencantumkan atau  
33 kesalahan dalam mencatat dapat mempengaruhi keputusan ekonomi  
34 pengguna, dan menjadi material, memerlukan pertimbangan karakteristik  
35 pengguna tersebut. PDP2LK paragraf 40 menyatakan "Pengguna  
36 diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas tujuan BI serta  
37 dampaknya terhadap pelaporan keuangan BI, dan memiliki kemampuan  
38 untuk mempelajari informasi yang dimaksud". Oleh karena itu, penilaian  
39 tersebut perlu mempertimbangkan bagaimana pengguna yang dimaksud  
40 diperkirakan terpengaruh secara rasional dalam pengambilan keputusan  
41 dan penilaian atas akuntabilitas BI.

## 1 **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### 2 3 **Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi**

4  
5 **05. Jika suatu PKAK secara spesifik berlaku untuk suatu**  
6 **transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang**  
7 **diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PKAK tersebut.**

8  
9 06. PKAK menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan  
10 laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi,  
11 peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu  
12 diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Namun, adalah  
13 tidak tepat untuk membuat atau membiarkan penyimpangan dari PKAK  
14 untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan dan surplus  
15 defisit.

16  
17 07. PKAK dilengkapi dengan panduan untuk membantu BI dalam  
18 menerapkan persyaratan dalam PKAK. Panduan yang merupakan bagian  
19 tidak terpisahkan dari PKAK bersifat wajib diterapkan. Sementara panduan  
20 yang bukan bagian tidak terpisahkan dari PKAK tidak berisi pengaturan  
21 untuk laporan keuangan.

22  
23 **08. Dalam hal tidak ada PKAK yang secara spesifik berlaku**  
24 **untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain, serta tidak ada SAU dan**  
25 **SAS spesifik yang dapat dirujuk, maka BI menggunakan**  
26 **pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu**  
27 **kebijakan akuntansi untuk menghasilkan informasi yang:**

- 28 **a. relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pengguna; dan**  
29 **b. andal, dalam laporan keuangan yang:**  
30 **i. menyajikan secara jujur posisi keuangan dan surplus defisit;**  
31 **ii. mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa, atau**  
32 **kondisi lainnya, dan bukan hanya bentuk hukum;**  
33 **iii. netral, yaitu bebas dari bias;**  
34 **iv. pertimbangan sehat; dan**  
35 **v. lengkap dalam semua hal yang material.**

36  
37 **09. Dalam membuat pertimbangan yang dijelaskan di paragraf**  
38 **08, BI:**

- 39 **a. mengidentifikasi dan menetapkan transaksi, peristiwa, atau**  
40 **kondisi lain sebagai transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang**  
41 **berbasis konvensional atau berbasis syariah, dan**

- 1 **b. mengidentifikasi dan menetapkan transaksi, peristiwa, atau**  
 2 **kondisi lain sebagai transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang**  
 3 **bersifat unik atau tidak unik, dan**  
 4 **c. mempertimbangkan keterterapan dari beberapa sumber yang**  
 5 **dijelaskan pada paragraf 10 sampai dengan 13.**

6  
 7 **10. Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat**  
 8 **konvensional dan unik maka BI mempertimbangkan sumber-sumber**  
 9 **berikut ini sesuai dengan urutan menurun:**

- 10 **a. persyaratan dan panduan dalam PKAK yang berhubungan dengan**  
 11 **masalah serupa dan terkait;**  
 12 **b. definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset,**  
 13 **liabilitas, penghasilan, dan beban dalam PDP2LK;**  
 14 **c. panduan akuntansi yang digunakan oleh bank sentral lain; dan**  
 15 **d. persyaratan dan panduan dalam SAU yang berhubungan dengan**  
 16 **masalah serupa dan terkait dan dapat mencerminkan tujuan**  
 17 **transaksi yang dilakukan oleh BI.**

18  
 19 **11. Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat**  
 20 **konvensional dan tidak unik maka BI mempertimbangkan sumber-**  
 21 **sumber berikut ini sesuai dengan urutan menurun:**

- 22 **a. persyaratan dan panduan dalam SAU yang berhubungan dengan**  
 23 **masalah serupa dan terkait; dan**  
 24 **b. definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset,**  
 25 **liabilitas, penghasilan, dan beban dalam KDP2LK.**

26  
 27 **12. Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat**  
 28 **syariah dan unik maka BI mempertimbangkan secara komprehensif:**

- 29 **a. tujuan BI;**  
 30 **b. substansi ekonomi dan hukum dari transaksi, peristiwa, atau**  
 31 **kondisi lain terkait;**  
 32 **c. perlakuan akuntansi menurut standar akuntansi atas transaksi,**  
 33 **peristiwa, atau kondisi lain yang sejenis pada entitas lain;**  
 34 **d. prinsip-prinsip akuntansi syariah yang diterima umum; dan**  
 35 **pendapat pihak yang berwenang untuk menilai transaksi syariah.**

36  
 37 **13. Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat**  
 38 **syariah dan tidak unik maka BI mempertimbangkan sumber-sumber**  
 39 **berikut ini sesuai dengan urutan menurun:**

- 40 **a. persyaratan dan panduan dalam SAS yang berhubungan dengan**  
 41 **masalah serupa dan terkait**

- 1 **b. definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset,**  
 2 **liabilitas, penghasilan, dan beban dalam KDP2LK Syariah; dan**  
 3 **c. persyaratan dan panduan dalam SAU yang sesuai dengan SAS,**  
 4 **yang berhubungan dengan masalah serupa.**

5  
 6 **14. Dalam membuat pertimbangan yang dijelaskan di paragraf**  
 7 **08, BI juga mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang**  
 8 **dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain, literatur**  
 9 **akuntansi lain, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber di**  
 10 **paragraf 10 sampai dengan 13.**

11  
 12 **Konsistensi Kebijakan Akuntansi**

13  
 14 **15. BI memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi keuangan**  
 15 **secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang**  
 16 **serupa, kecuali suatu PKAK secara spesifik mengatur atau**  
 17 **mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi**  
 18 **yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PKAK mengatur atau**  
 19 **mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi**  
 20 **yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap**  
 21 **kelompok.**

22  
 23 **KETENTUAN TRANSISI**

24  
 25 16. Pernyataan ini berlaku secara prospektif.

26  
 27 **TANGGAL EFEKTIF**

28  
 29 17. Pernyataan ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan dalam  
 30 Peraturan Dewan Gubernur BI.

**Sekretariat Komite Penyusun KAKBI**

Bank Indonesia, Gedung C, Lantai 10,

Jl. MH Thamrin, No.2, Jakarta Pusat, 10350

Telepon: 021-29817018 / 29817150; Fax: 021-34830210,

Email: [kpkakbi@bi.go.id](mailto:kpkakbi@bi.go.id)